

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia di Thailand merupakan masalah yang sangat serius di abad ke-20. Tidak hanya membahayakan negara Thailand itu sendiri, tetapi juga membahayakan negara-negara tetangganya yang masuk kedalam wilayah ASEAN. Akibat paling bahaya dari perdagangan manusia itu sendiri adalah penyakit menular seperti HIV/AIDS dan kriminalitas. Thailand sendiri merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi negara pusat perdagangan manusia. Karena Thailand adalah negara tujuan, transit dan sumber bagi kejahatan perdagangan manusia. Hal tersebut menjadikan Thailand sebagai pusat perhatian ASEAN dalam menghadapi kasus perdagangan manusia. Menurut Departemen Luar Negeri AS menyebut Thailand berada di tingkat 2 dalam daftar negara-negara yang patut dipantau aktivitas perdagangan manusianya. Rata-rata jumlah korban perdagangan manusia di wilayah Thailand mencapai 651.800 jiwa pertahun dengan kriteria korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Korban biasanya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, pendidikan dibawah rata-rata, serta tidak terdaftar sebagai penduduk nasional Thailand. Selain dipekerjakan dalam prostitusi, korban perdagangan manusia yang terjadi di Thailand juga dipekerjakan sebagai buruh dengan bayaran rendah.

Sebagai negara transit perdagangan manusia, Thailand menjadi penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan. Umumnya Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain seperti Jepang sebagai tujuan prioritas Belanda, Jerman, Australia via Malaysia, Hongkong, India, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk bisnis seks luar negeri. Alasan

mengapa perdagangan manusia marak terjadi di Thailand adalah karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sehingga terdapat kesenjangan di beberapa wilayah Thailand yang mengakibatkan mereka yang tidak beruntung untuk bekerja secara paksa melalui perdagangan manusia tersebut.

Perdagangan manusia di Thailand memiliki beberapa faktor dalam penyebarannya di Thailand. Pertama, pariwisata sebagai sarana prostitusi yang menunjang kegiatan perbudakan seks. Pariwisata sendiri adalah sumber pendapatan utama bagi Thailand, terhitung 6-7% dari PDB dan membawa sekitar 14 juta pengunjung per tahun. Selanjutnya, beberapa tahun terakhir sekitar 144 juta domestik pelancong di Thailand berpariwisata. Sementara Thailand terus menjadi salah satu negara tujuan utama *Human Trafficking* untuk eksploitasi seks anak di wilayah ASEAN. Salah satu cara mereka memasarkan perdagangan anak adalah melalui rumah bordil yang diselipkan di beberapa titik pariwisata, sehingga wisatawan asing maupun lokal mudah mendapatkannya. Hal tersebut sangat sulit untuk di hadapi oleh pemerintah Thailand karena ada kekuatan yang mengorganisir kegiatan rumah bordil pada area pariwisata. Sebuah penelitian wisata seks anak oleh Universitas Johns Hopkins, diterbitkan pada 2007, menemukan bahwa kelompok terbesar wisatawan seks asing di Thailand mungkin menjadi pelaku oportunistik atau situasional, dimana tanpa preferensi tertentu untuk anak-anak dan tanpa rencana sebelumnya untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Namun, ketika disajikan dengan peluang yang bagus mereka langsung memanfaatkan anak-anak yang rentan terhadap kegiatan seks.

Beberapa wilayah bagian Thailand terkenal dengan adanya kasus yang melibatkan penangkapan guru orang asing yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Hal tersebut menjadi sorotan karena kerentanan anak sekolah untuk eksploitasi seksual menjadi semakin nyata karena ketidakhadiran mekanisme untuk melindungi anak-anak di institusi pendidikan. Orang asing yang mengunjungi Thailand dengan tujuan

mengeksploitasi anak-anak memanfaatkan kebijakan visa Thailand pada saat berkunjung. Mereka bisa dengan mudah mencari pekerjaan di sekolah bahasa atau sekolah informal Thailand di mana semua itu diperlukan yaitu menjadi penutur asli dan memiliki gelar dalam bentuk apa pun. Menurut Kepolisian Kerajaan Thailand, total 42 - 72 laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran seksual pada anak diterima di Hotline Nasional pada tahun 2007 dan 2008. Para pelanggar anak-anak yang berhasil ditangkap pada tahun 2007 - 2008 adalah orang yang berusia 50-59 tahun ke atas, sementara korban kebanyakan anak - anak dan remaja berusia antara 12 dan 20 tahun.

Kedua, Pornografi merupakan faktor pendukung selanjutnya yang membuat kasus perdagangan manusia di Thailand semakin marak. Penelitian pernah dilakukan oleh ECPAT Internasional, ditemukan bahwa dari enam belas kasus penangkapan pelaku orang asing yang terjadi di Thailand pada tahun 2009 dikumpulkan dari sumber media, sebagian besar yang diproduksi menggunakan peralatan pornografi sendiri dan rekaman digital disebutkan sebanyak 56,85% dari laporan yang relevan. Jumlah pornografi anak yang diproduksi sendiri oleh pelaku kekerasan berarti cukup tinggi untuk menghidupkan kembali kasus seksual pada anak dan mengkodinir tindakan seksual melalui merekam, melihat, berbagi dan mendistribusikan gambar penyalahgunaan. Selanjutnya, anak-anak akan tertarik pada kegiatan seksual yang diposting di internet, mereka tidak dapat diberantas dan oleh karena itu dapat diakses secara permanen.

Kemudian Thailand sebagai negara sendiri wajib melindungi warga negaranya dari kasus perdagangan manusia. Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan baru yaitu Anti-Trafficking in Persons B.E 2551. Pemerintah Thailand membentuk berbagai kebijakan eksternal dan internal sebagai bentuk upaya dalam menangani masalah tersebut. Kebijakan internal pemerintah Thailand terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nasional Pemerintah Thailand, sedangkan kebijakan eksternal merupakan bentuk upaya yang dilakukan guna mengatasi

masalahmasalah internasional bersama sebagai warga negara dunia. Kebijakan internal yang dilakukan Pemerintah Thailand seperti misalnya pembentukan kebijakan nasional Anti-Trafficking in Persons B.E 2551, dibangunnya detention center bagi para korban untuk meminta pertolongan. Bentuk kebijakan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah kerjasama baik secara bilateral, maupun multilateral, kerjasama regional dan internasional serta adanya peran media baik lokal maupun internasional.

Kebijakan eksternal tersebut menjadi batu loncatan Thailand dalam menghadapi kasus perdagangan manusia. ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi wilayah Asia Tenggara sudah seharusnya berperan dalam kejahatan transnasional ini. Kemudian ASEAN mengeluarkan beberapa Deklarasi sebagai respon terhadap masalah tersebut, yaitu Deklarasi 1997 menghasilkan kesepakatan yang dapat dikategorikan dalam dua bidang: (a) membuat komitmen jangka panjang; dan (b) membangun kerangka kerja untuk koordinasi. Pertama, perjanjian itu memungkinkan komitmen jangka panjang. Deklarasi 1997 membentuk Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional yang rutin terjadi (AMMTC). Ini berfungsi sebagai kendaraan utama untuk mengoordinasikan tindakan regional dan melanjutkan diskusi tentang masalah ini dengan meminta para Menteri ASEAN bertemu setidaknya sekali setiap dua tahun. Selanjutnya adalah Deklarasi 2004 menentang perdagangan manusia khususnya wanita dan anak anak. Deklarasi 2004 adalah yang pertama diadopsi ASEAN secara khusus untuk memerangi perdagangan manusia. Fokusnya terbagi dua, yaitu Pertama, ini bukan lagi sebuah deklarasi yang mencakup semua kejahatan lintas negara, tetapi mengangkatnya status dan penargetan perdagangan manusia dengan sendirinya, yang telah dibayangi oleh perdagangan narkoba dan terorisme. Kedua, Deklarasi 2004 juga menggambarkan perubahan, dalam hal ini ASEAN bermaksud untuk memecahkan masalah perdagangan manusia, yang berfokus pada penjahat keadilan. Deklarasi 2004 mengakui kebutuhan untuk memperkuat legislatif, penegakan hukum dan tanggapan yudisial untuk memastikan tindakan

pencegahan diambil terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perorangan atau sindikat perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak . Selain pernyataan tersebut, enam dari delapan ketentuan dalam Deklarasi 2004 adalah juga terkait dengan masalah hukum dan penegakan hukum.

Kemudian setelah itu ada Konvensi ASEAN 2015. Konvensi ini sendiri sebenarnya adalah untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada Deklarasi 2004 dan berusaha untuk menyempurnakannya. sebuah proporsi yang signifikan dari Konvensi 2015 membahas kriminalisasi, pencegahan, Perlindungan, penegakan hukum, dan cooperation kerjasama internasional. Bidang kerja sama ini sebagian besar telah dibentuk dari Deklarasi 2004, dan kemudian dilanjutkan dan tergabung dalam Konvensi 2015. Bahkan, tidak hanya ada kesinambungan, kerangka hukum untuk kerja sama regional pada perdagangan manusia juga tampaknya semakin diperdalam. Misalnya, ketentuannya mengatur lebih spesifik.

VI.2 Saran

Saran penulis pada kasus peran ASEAN dalam menghadapi *Human Trafficking* di Thailand menjadi dua, yakni saran umum dan khusus. Saran umum dari penulis adalah perlindungan korban yang perlu ditingkatkan, peningkatan tingkat penuntutan dan hukuman dan peningkatan pencegahan adalah tiga tujuan utama dari tindakan anti-perdagangan manusia. Namun, laporan yang tercatat menunjukkan perbedaan besar antara jumlah yang diperkirakan dan jumlah yang dikonfirmasi dari korban yang diidentifikasi secara resmi. Skema perlindungan dan bantuan yang tidak memadai, tingkat penuntutan dan hukuman yang sangat rendah dan tidak ada tanda-tanda angka penurunan perdagangan manusia yang signifikan. Meskipun ada upaya yang terus meningkat di tingkat regional untuk mengoordinasikan legislasi nasional dan respons kebijakan, undang-undang, peraturan, kebijakan yang tidak selaras dan implementasinya tetap menjadi salah satu tugas paling signifikan dalam tindakan anti-perdagangan manusia.

Sedangkan saran khusus dari penulis ada 2, yaitu yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi korban. Identifikasi korban adalah salah satu aspek yang paling penting dalam memerangi perdagangan manusia. Tidak hanya bermasalah mengenai identifikasi korban sehingga berakibat mencegah korban dari menerima perlindungan dan bantuan penting, tetapi mereka juga merusak tindakan penegakan hukum yang efektif dan hal itu merupakan salah satu alasan utama tingkat penuntutan dan hukuman menjadi sangat rendah sehingga pelaku kejahatan tidak menyerah dengan mudah.

Kedua adalah pelatihan staf. Staf bagian identifikasi dan perlindungan korban tergantung pada kapasitas dan sumber daya pejabat garis depan, termasuk penegakan hukum, migrasi dan inspektorat tenaga kerja. Kurangnya pelatihan yang terus menerus dan khusus dari pejabat negara dapat merusak implementasi yang memadai dari undang-undang dan kebijakan anti-perdagangan manusia. Karena laporan Uni Eropa mencatat bahwa sifat kegiatan pelatihan yang bersifat sementara, kurangnya pelatihan khusus merupakan hal yang sedang dihadapi ASEAN dalam menghadapi kasus perdagangan manusia.